

**ROLE OF NAHDLATUL ULAMA IN FOSTERING INDONESIAN  
NATIONALISM IN EFFORT TO REALIZE BALDATUN THAYYIBATUN  
WA ROBBUN GHOFUR**

**PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM MEMBINA  
NASIONALISME INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN  
BALDATUN THAYYIBATUN WA ROBBUN GHOFUR**

**Mohamad Alwi Lutfi<sup>1</sup>, Karim Suryadi<sup>2</sup>, Endang Sumantri<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>SMPN 1 Banjarharjo, Jl. Raya Cikakak No. 12 Banjarharjo-Brebes,

<sup>2</sup>Dosen Prodi PKn Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>3</sup>Dosen Prodi PKn Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail : alwiprajab@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to examine and analyze the meaning of nationalism by NU kiai. The method used is a qualitative case study as a research reference. This research data collection using interviews, observation, and study documentation. The results of this study regarding: the subject of thought NU in developing nationalism in Indonesia; perspective on good citizens by Nahdlatul Ulama; Attitudes and step NU struggles in maintaining the participation of Indonesian nationalism; NU perspective of the international Islamic organizations that want to establish the Caliphate; NU efforts in developing the nation's morals; NU perspective in the baldatun thoyibatun wa robbun ghofur; and constraints faced in fostering nasioanalisme NU.*

**Keywords:** *Nahdlatul Ulama (NU), Nationalism, Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis makna nasionalisme menurut kiai NU. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus sebagai acuan penelitian. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini mengenai: subjek pemikiran NU dalam mengembangkan nasionalisme di Indonesia; perspektif tentang warga negara yang baik menurut Nahdlatul Ulama; Sikap dan langkah perjuangan NU dalam partisipasi mempertahankan nasionalisme Indonesia; perspektif NU terhadap organisasi-organisasi Islam internasional yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah; upaya Nahdlatul Ulama dalam membina moral bangsa; perspektif NU mengenai baldatun thoyibatun wa robbun ghofur; dan kendala yang dihadapi NU dalam membina nasioanalisme.

**Kata Kunci :** *Nahdlatul Ulama (NU), Nasionalisme, Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur*

Perjalanan Nahdlatul Ulama dalam perpolitikan nasional sangat menarik untuk dikaji, hal ini karena bila kita melihat latar belakang Nahdlatul Ulama berdiri yakni berasal dari Komite Hijaz yang merupakan kumpulan ulama yang bermaksud “me-lobi” raja Arab Saudi saat itu agar memperbolehkan madzhab-madzhab tetap berkembang dan bisa ikut dalam ibadah haji.

Namun, seiring dengan perjalanan bangsa saat itu yang sedang dijajah Belanda, maka NU

pun tidak ketinggalan untuk ikut *jihad fi sabilillah* melawan Belanda. Saat menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia, tokoh NU pun – yakni KH. Wahid Hasyim – turut merumuskan suatu dokumen yang bersejarah bagi bangsa yaitu Piagam Jakarta yang di dalamnya berisi sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.

Saat reformasi marak terjadi gerakan formalisasi syariat Islam di Indonesia, angin segar kebebasan yang dihembuskan telah

melahirkan sebuah fenomena baru yang mengguncang rasa nasionalisme Indonesia sebagai suatu bangsa (Setiawan, 2007: vi). Fenomena tersebut diawali dengan munculnya beberapa organisasi kemasyarakatan Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia, dan Front Pembela Islam (FPI). Mereka hadir dalam konteks kampanye, yakni dalam rangka “penegakkan dan penerapan syariat Islam”, “mendirikan negara Islam”, sampai “pembentukan Khilafah Islamiyah”.

Saat ini pun Nahdlatul Ulama dihadapkan pada dua kelompok besar yaitu kelompok Islam radikal yang kerap menimbulkan keresahan melalui aksi terorisme dan melarang praktik-praktik keagamaan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia serta gerakan formalisasi syariat Islam dan munculnya kelompok liberal yang dicetuskan oleh anak-anak muda NU sendiri.

Pelemahan terhadap NU tersebut melalui proses dan sejumlah cara:

1. Melalui pendekatan kelembagaan
2. Melalui pendekatan isu HAM, pluralisme dan toleransi maupun isu kesetaraan gender.
3. Melalui pendekatan kurikulum pesantren dan madrasah.
4. Melalui pendekatan media dan permainan isu (Baso, 2013: 99).

Apabila melihat empat hal tersebut di atas, hal ini termasuk penjelasan dalam pendekatan kurikulum pesantren dan madrasah, seolah-olah Pendidikan Kewarganegaraan “bertentangan” dengan kurikulum pesantren. Padahal Pendidikan Kewarganegaraan tidak sempit, ada dimensi sosio-kultural dalam bentuk *community civic education*, artinya Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berada dalam lingkup persekolahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Cogan dalam menjelaskan perbedaan istilah antara *civic education* dan *citizenship education*. Pendidikan Kewarganegaraan adalah terjemahan dari istilah asing *civic education* atau *citizenship education*. Terhadap dua istilah ini, John Cogan telah membedakan dengan mengartikan *civic education* sebagai “...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives” (Winataputra, 2012: 257), artinya bahwa PKn adalah suatu mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara

muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Sedangkan *citizenship education* digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup : “...both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen” (Winataputra, 2012: 257) yang artinya pendidikan kewarganegaraan merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media.

Penelitian ini berfokus pada “bagaimana organisasi NU berperan sebagai *community civic* dalam membina nasionalisme Indonesia?”. Hal ini dapat terungkap melalui pendekatan naturalistik-kualitatif yang digunakan dalam model studi kasus, yang satuan kajiannya dilakukan dalam lingkup yang terbatas. Bodgan dan Biklen (1982:58) mengatakan: “... a detailed examination of one setting, or one single subject, or one single despositiry or document, or one particular event”. Dalam hal yang lebih khusus, model studi kasus seperti digambarkan di atas, pada prinsipnya adalah model studi kasus tunggal (*single case study*). Penggunaan model studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitiannya dilakukan pada satu fokus yaitu di masyarakat yang dalam hal ini satu fokus yang dimaksud adalah komunitas kiai NU. Di samping itu, studi kasus mempunyai kelebihan dibanding studi lainnya yaitu peneliti dapat mempelajari sasaran penelitian secara mendalam dan menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan untuk menggali peran NU dalam membina nasionalisme khususnya ditinjau dari aspek studi kasus tentang makna nasionalisme menurut para kiai NU di PBNU dan PCNU Kabupaten Brebes. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui subjek pemikiran NU dalam mengembangkan nasionalisme di Indonesia;
2. mengetahui pemikiran NU dalam mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizens*);
3. mengetahui sikap dan langkah perjuangan NU yang sesuai khittah 1926 dalam

- partisipasi mempertahankan nasionalisme Indonesia;
4. mengetahui pandangan NU tentang organisasi Islam internasional yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia;
  5. mengetahui peran NU sebagai organisasi perjuangan nahdliyin terhadap pembinaan moral bangsa Indonesia;
  6. mengetahui pandangan NU terhadap upaya untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai *baldatun thayibatun wa robbun ghofur*;
  7. mengetahui kendala yang dihadapi NU dalam memperjuangkan nasionalisme Indonesia.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2004: 4). Lokasi dalam penelitian ini adalah di beberapa tempat yaitu: PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kabupaten Brebes.

Dalam penelitian ini, mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam, hal ini diawali dengan pengenalan peneliti terhadap informan, mengenai maksud dan tujuan wawancara. Dalam wawancara dengan para kiai NU dilakukan dengan alat perekam supaya informasi yang diperoleh bisa diceritakan semua dan menghindari data tidak ada yang terlupakan. Berikut ini nama narasumber yaitu para kiai NU:
  - a. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA
  - b. Habib Luthfi Bin Yahya
  - c. Dr. KH. Cholil Nafis, M.A
  - d. KH. Ahmad Baso
  - e. KH. Athoilah, S.E., M.Si.
  - b. KH. Sholeh Basalamah
  - c. KH. Aminudin Afif.
  - d. KH. Mas Mansyur Tarsudi.
  - e. KH. Labib Shoiq.
  - f. KH. Sayid Abdurrahman
  - g. KH. Subhan Makmun.
2. Observasi, dilakukan di beberapa tempat, antara lain:

- a. Masyarakat warga NU di Kabupaten Brebes yang mengikuti kegiatan *istighotsah* yang dipimpin oleh KH. Dimiyati Rois (pengasuh Pondok Pesantren Kaliwungu Kendal) pada setiap malam Jumat Wage di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba yang dihadiri oleh puluhan ribu warga NU.
  - b. Kegiatan rutin jamiyah bapak-bapak dan ibu-ibu di Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes dan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
  - c. Kegiatan santri di Babakan Ciwaringin, terutama pada kegiatan haul sesepuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin.
  - d. Kegiatan santri Pondok Pesantren Luhur At-Tsaqofah yang dipimpin oleh KH. Said Aqil Siraj.
3. Dokumentasi dan literatur. Dokumentasi, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari lembaga atau organisasi Nahdlatul Ulama.
    - a. Dokumentasi dan literatur dari buku-buku ke-NU-an dan penelitian tentang Nahdlatul Ulama yang ada di perpustakaan PBNU Jakarta maupun penulis meminjam pada kiai atau membeli sendiri.
    - b. Video pengajian Islam dan Kebangsaan yang disiarkan oleh ASWAJA TV yang diisi oleh KH. Saiq Aqil Siraj.

Untuk memudahkan peneliti dalam proses menganalisis data penelitian ini, maka peneliti menggunakan langkah analisis sebagai berikut:

1. Analisis sebelum di lapangan. Peneliti kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menemukan fokus penelitian. Berkaitan dengan itu maka, peneliti telah melakukan analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu tentang Nahdlatul Ulama khususnya mengenai nasionalisme dan peran NU dalam kenegaraan. Selain itu analisis dilakukan terhadap rencana tempat penelitian dengan melakukan studi pendahuluan baik melalui dokumen penelitian, berita di situs NU Online, maupun dengan mengamati aktivitas masyarakat Nahdlatul Ulama di kabupaten Brebes. Analisis ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran tentang

masalah yang akan dikaji oleh peneliti. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2008: 90).

2. Analisis selama di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan wawancara lagi, sampai pada tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap relevan atau kredibel. Spradley membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2008: 99). Tahapan penelitian kualitatif menurut Spradley sebagai berikut :

- a. Memilih situasi sosial (*Place, Actor, Activity/PAA*). Situasi sosial yang dipilih adalah masyarakat basis NU pesantren NU. Untuk masyarakat basis NU dan Pesantren yang dipilih adalah di Kabupaten Brebes. Tempat tersebut dipilih karena pada masyarakat banyak perkumpulan masyarakat NU dalam kegiatan yasinan, tahlilan, dan sejenisnya.
  - b. Melaksanakan observasi partisipan. Untuk mengetahui situasi sosial yang ada di suatu masyarakat komunitas santri yang akan diteliti, maka yang dilakukan adalah mengikuti beberapa kegiatan masyarakat dan santri-santri ketika melaksanakan ibadah dan mengaji di pesantren. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis di dalam observasi partisipan adalah:
    - Penulis menjadi pengurus ranting Nahdlatul Ulama di Desa Cigedog Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes periode 2012-2017.
    - Menjadi anggota Jamiyah pengajian Yasinan Al-Fadhilah setiap malam Jum`at di desa Cigedog Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.
    - Menjadi jamaah pada kegiatan *istighostah* setiap malam Jum`at Wage di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Brebes
    - Mengikuti pengajian Rabu Sore di masjid Agung Brebes yang diasuh oleh KH. Subhan Makmun.
    - Mengikuti *istighostah* yang dilaksanakan pada malam Jum`at Pahing di Masjid Islamic Center Brebes yang dipimpin oleh KH. Syaikh Sholeh Basalamah dan KH. Aminudin Afif.
    - Mengikuti kegiatan *haul* sesepuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin pada tanggal 3 Mei 2014.
  - c. Mencatat hasil observasi dan wawancara. Secara garis besar, catatan hasil observasi dan wawancara dilakukan saat berlangsung wawancara dan observasi secara spontan dengan menuliskan kata-kata penting. Selanjutnya ketika observasi dan wawancara telah selesai catatan diperlengkap dan diperinci.
  - d. Melakukan observasi deskriptif. Observasi deskriptif dilakukan dengan mengamati segala apa yang ada di lingkungan masyarakat, majelis ta`lim serta yang ada di tempat lain untuk nantinya dijelaskan secara rinci.
  - e. Melakukan analisis domain. Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. Hasilnya berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti.
  - f. Melakukan observasi terfokus. Observasi terfokus yang dilakukan adalah melakukan pengamatan yang telah ditentukan sebelumnya, yakni dari hasil analisis domain, kategori yang akan diwawancarai, sehingga setelah observasi selesai, melakukan menentukan pihak-pihak atau para kiai yang akan diwawancara untuk data penelitian.
3. Analisis setelah di lapangan. Analisis yang dilakukan dengan cara triangulasi, dari jawaban kiai akan dikumpulkan dan diberikan kode-kode, mulai dari kode informan sampai kode informasi yang diberikan. Langkah-langkah analisis antara lain:
- a. Kategorisasi (pengkode-an). Pengkodean dimulai dari pengkodean informan, para kiai di lingkungan PBNU diberi kode PB, dan para kiai di lingkungan PCNU Brebes diberi kode PC. Untuk data

diberikan pengkodean sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, misalnya: PB1:A (untuk data dari informan di PBNU kedua dengan menjawab rumusan masalah yang pertama).

- b. Ringkasan dari tiap responden. Setiap hasil wawancara dengan responden dibuat ringkasan untuk memudahkan analisis. Hal ini dilakukan karena terkadang ada beberapa informan yang menjawab sekaligus untuk beberapa pertanyaan.
- c. Kontekstualisasi. Analisis naratif diuraikan pada bagian pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Subjek Pemikiran NU dalam Mengembangkan Nasionalisme

Menurut KH. Said Aqil Siraj, “pemikiran NU dalam mengembangkan nasionalisme berasal pemikiran KH. Hasyim Asy’ari yang menyatukan antara konsep Islam dan nasionalisme”. Tradisi amaliyah dalam Nahdlatul Ulama sejalan dengan nilai nasionalisme yaitu menjaga tradisi, menjaga jati diri bangsa Indonesia, kepribadian yang langsung ke masyarakat. Menurut Habib Luthfi nasionalisme Indonesia timbul sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Allah menciptakan manusia bersuku-suku berbangsa supaya saling mengenal (*lita’arofu*). Ketika sudah saling mengenal, maka akan tumbuh menjadi bangsa, cinta tanah air.

Sedangkan menurut KH. Athoilah, “dalam tradisi amaliyah NU itu sebenarnya adalah salah satu upaya pendekatan kepada masyarakat yang dapat memunculkan persatuan, dengan persatuan maka akan muncul rasa nasionalisme”. KH Athoilah menerangkan bahwa “warga NU dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu NU struktural, NU kultural, dan NU lunturan”.

Menurut KH. Syaikh Sholeh Muhammad Basalamah dalam hadis *hubbul wathon minal iman*, yaitu cinta kepada negara adalah sebagian dari iman. Kandungan hadits tersebut adalah pertama kita harus mentati *ulul amri*, sebab kalau orang membangkang dari *ulul amri*, berarti tidak cinta tanah air, tapi dengan catatan selama *ulum amri* atau pemerintah itu tidak mengarahkan kita kepada hal-hal yang

bertentangan dengan syariat atau kaitannya dengan maksiat. Kedua, *hubbul wathon minal iman* itu kita berusaha menjadi warga negara yang baik. Amaliah dzikir berjamaah yang menjadi wujud nasionalisme dari Nahdlatul Ulama.

Menurut KH. Aminudin Afif Kekuatan bangsa dan rasa nasionalisme Indonesia sebetulnya itu pada tahlil, karena tahlil setiap minggu ada, setiap bulan ada, setiap tahun ada, itu secara tidak langsung akan mengokohkan *ukhuwah*, kebersamaan, jadi dengan tahlil menjadi kekuatan yang luar biasa.

Perkataan para kiai tentang kaitan antara tradisi Nahdlatul Ulama dan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dibuktikan dengan hasil observasi peneliti bahwa di Kabupaten Brebes rutin dilaksanakan istghosah yang diikuti oleh warga NU untuk mendoakan keselamatan bangsa yaitu pada malam Jumat Pahing di Masjid Islamic Center yang biasa dihadiri oleh ratusan jamaah, dan pada malam Jumat Wage di desa Tegalglagah yang diikuti oleh ribuan Jamaah dari seluruh penjuru Kabupaten Brebes. Selain itu, menurut KH. Sayid Abdurahman NU adalah organisasi Islam sebagai dinamisor nasionalisme yang menyatukan seluruh bangsa, karena menyatukan antara ajaran Islam dan tradisi adat yang sudah ada disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman.

#### Pemikiran NU dalam Mewujudkan Warga Negara yang Baik dan Cerdas (*Smart and Good Citizens*)

Menurut KH. Said Aqil Siraj, “ciri utama warga negara yang baik adalah memiliki rasa nasionalisme yang religius dan bisa disatukan menjadi nasionalisme religius”. Dalam tujuan membentuk warga negara yang baik, NU mengajarkan melalui kitab-kitab akhlak dan tauhid. Dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan peran NU sejak sebelum merdeka sampai sekarang kurang jelas atau tidak diterangkan dalam pelajaran tentang peran NU dalam perjuangan, peran perjuangan kiai.

Menurut KH. Sayid Abduraman:

Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat hukum. KUHP dan KUHP yang sekarang bukan murni buatan Belanda, yang sebenarnya adalah terjemahan dari kitab *ihya ulumudin*. Perjuangan kemerdekaan itu mengorbankan tidak sedikit dari ulama

dan santri, sehingga perlu dijelaskan terhadap peserta didik. Pancasila itu dikaji dari Alquran, Pancasila kalau dalam bahasa politik disebut dengan istilah “digali dari bumi pertiwi”, mengapa? Supaya tidak menyinggung perasaan minoritas, yang dimaksud bumi pertiwi dalam istilah *mantiq* yakni *min itlaqil mahal, wa irodatil mahil*, menyebut tempat tapi yang dimaksud adalah orang yang menempati. Indonesia mayoritas muslim, artinya Pancasila digali dari Islam, begitu bahasa *mantiq*-nya. Buktinya sembilan orang yang merumuskan Pancasila, banyak terdiri dari para Kiai. Itu harus dijelaskan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Kenapa sekarang banyak yang menentang Pancasila?, karena tidak di jelaskan hal tersebut dalam pendidikan di sekolah.

Untuk mewujudkan warga negara yang baik dalam pemberdayaannya dilakukan di pesantren yang selama ini sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama.

### **Sikap dan Langkah Perjuangan NU Sesuai Khittah 1926 dalam Partisipasi Mempertahankan Nasionalisme**

KH. Said Aqil Siraj berpendapat bahwa “sikap NU dalam mempertahankan nasionalisme NU adalah fleksibel, sesuai dengan perkembangan. Hal ini dikarenakan NU sebagai *ahlussunnah wal jamaah* dalam kehidupan politik dan segala aspek kehidupan lainnya berpegang pada dalil *antum a'lamu bi umurin dunya*”. Lebih jelas lagi dipaparkan oleh KH. Cholil Nafis yaitu:

Salah satu langkah yang fenomenal adalah Resolusi jihad yang mengkristal. Sebelumnya sudah ada ruh nasionalisme dalam Komite Hijaz yang mengedepankan *lokal wisdom* (kearifan lokal). Kemudian NU ketika pemilihan Umum 1955 menjadi peserta pemilu dalam bentuk Partai Politik. Ketika Presiden Soeharto meleburkan NU dalam PPP, NU pun taat terhadap keputusan tersebut walaupun akhirnya NU kembali ke khittah 1926 dan tidak ikut serta dalam politik praktis, tetapi dalam era reformasi beberapa kiai NU mendeklarasikan Partai Kebangkitan

Bangsa, bukan hanya sebagai wadah NU, tetap warga NU bebas ke partai mana pun. Itu semua adalah strategi dakwah. Kita ingin membedakan antara substansi nilai yang ada di NU dan strategi penyebaran dan penguatan NU.

Apabila melihat pendapat KH. Cholil Nafis, NU memang berperan dalam politik praktis saat itu, sehingga NU terkesan berubah-ubah dalam berbagai kondisi. Hal tersebut dikuatkan alasannya oleh KH. Athoilah yang berkata:

Ada dalil yang artinya “kebijakan seorang pemimpin, harus memberikan *masalah* pada umatnya”. Sekarang kemaslahatan bagi umat itu antar zaman mempunyai kondisi berbeda, kondisi yang satu dengan kondisi lain pasti berbeda. Di sinilah NU mengimbangi kondisi yang ada, yang semuanya adalah untuk kemasalahan umat, dan itu semua juga sebenarnya sudah diatur dalam kehidupan, bukan berarti lantas NU seperti ikut-ikutan dengan mereka-mereka yang suka melakukan perlawanan, Islam itu kan sebenarnya lebih lunak. Kuncinya NU itu selalu mengikuti jejak para Walisongo yang tidak pernah melakukan perlawanan terhadap siapa pun tidak pernah mau menyerang.

### **Pandangan NU Tentang Organisasi-Organisasi Islam Internasional yang Ingin Mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia**

Nahdlatul Ulama memandang bahwa organisasi yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah membahayakan persatuan bangsa, KH. Said Aqil Siraj berpendapat bahwa “mereka membawa ideologi/pemikiran yang asing bagi kepribadian Indonesia”. Untuk menguatkan pendapat tersebut, KH. Syaikh Sholeh Basalamah mengatakan:

Tidak ada dalam Alquran yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan umat Islam membuat negara, dalam hadits juga tidak ada, hanya sekarang ini kan ada organisasi yang mengusung namanya khilafah. Jadi mereka tidak pernah mengatakan negara Islam, tetapi mereka ingin mewujudkan khilafah. Khilafah ini dalam Islam satu kepemimpinan sedunia, bukan satu blok, bukan di Indonesia khalifahnyanya ini, di

Saudi khalifah ini, bukan seperti itu, jadi khalifah satu dunia, kholifah. Itu memang ada beberapa ayat, ada beberapa hadits yang mendukung tentang khilafah.

Kemampuan kita untuk mewujudkan khilafah sekarang belum mampu, karena khilafah itu bukan sebuah kewajiban, dilaksanakan ketika memungkinkan dan mampu, apabila belum mampu maka tidak berdosa bila tanpa khilafah.

### **Peran NU Sebagai Organisasi Perjuangan Nahdliyin Terhadap Pembinaan Moral Bangsa Indonesia.**

Peranan NU terhadap pembinaan moral bangsa dilakukan dengan cara pendidikan pesantren dan pelestarian tradisi. Peran pendidikan pesantren di NU sangat besar, akan tetapi harus ada penyatuan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, sebagaimana dikatakan oleh KH. Cholil Nafis yaitu:

NU mempunyai jurus untuk menyelesaikan permasalahan moral bangsa, terutama generasi muda. Pendidikan pesantren yang *integrated* antara keagamaan dan kenegaraan/kebangsaan, jadi tidak cukup ketika NU tekun pada salaf saja, tetapi juga tidak bisa dibenarkan pemerintah yang mengejar ke arah yang sifatnya matematis saja, saintis saja itu tidak cukup. Maka di sini dikotomi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan perlu dipikirkan untuk diintegrasikan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Integrasi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu saintis perlu digabungkan.

Peranan NU dalam pesantren juga diperkuat dengan pendapat dari KH. Athoilah yang menyatakan bahwa:

NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan sudah melakukan upaya dalam memperbaiki moral bangsa, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, contoh pondok pesantren membina akhlak bangsa. Ketika pendidikan itu yang ditanamkan pelajaran agama, punya nilai lebih dibanding kurikulum pemerintah. Itu juga bagian dari pembinaan moral bangsa termasuk kegiatan-kegiatan dakwah, sehingga harapan kita generasi muda

yang mempunyai moral, tetapi persoalannya kita ini hanya mampu memperbaiki dengan dakwah *bil lisan* saja, padahal dakwah yang paling efektif itu *bil yad*, dengan kekuasaan.

Tindakan nyata dalam usaha membina moral bangsa dilakukan oleh kiai di Brebes adalah melalui pesantren yang berada di tengah kota, sebagaimana yang dilakukan oleh KH. Subhan Makmun yang menyatakan, “mendirikan pesantren di tengah kota adalah untuk para siswa di sekitar pesantren supaya lebih mengenal agama”.

### **Pandangan NU Terhadap Upaya Untuk Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai *Baldatun Thayibatun Wa Robbun Ghofur*.**

Menurut KH. Said Aqil Siraj mengenai bagaimana untuk mewujudkan Indonesia sebagai *baldatun thayyibatun wa robbun ghofur* adalah:

Mengambil dasar dari kitab *fathul mu'in*, yaitu warga negara harus beriman kepada Allah, menegakkan ibadah, dan bila perlu siap-siap perang atau pertahanan, dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara yang lemah, bahan makan cukup, tempat tinggal cukup, sandang cukup, obat-obatan, dan biaya kesehatan.

Langkah yang dilakukan NU secara nyata sebagaimana dilakukan oleh para kiai adalah membangun desa/daerah terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan pendapat dari KH. Cholil Nafis yang menyatakan bahwa .

Selama ini yang dilakukan oleh NU itu bukan langsung *baldatun thayyibatun wa robbun ghofur* tapi *qoryatun thayyibatun wa robbun ghofur (village paradise)*, kalau *baldah* itu negara, yang dilakukan oleh ulama NU adalah menjadikan desa yang baik, maka kiai di desa itu ketika tidak hanya membangun pesantren saja tapi lingkungan juga ikut menikmati, bukan hanya menikmati ilmunya tapi pengembangan ekonominya.

Hal ini dibuktikan dengan dikenalnya nama daerah bagi sebuah pesantren, misal pesantren Buntet dan Kempek Cirebon, pesantren Tebu Ireng, pesantren Lirboyo,

padahal di pesantren tersebut punya nama masing-masing. Selain itu KH. Syaikh Sholeh Muhammad Basalamah menyampaikan bahwa:

Konsep *baldatun thayibatun wa robbun ghofur* bukan berarti sebagai negara Islam, tapi orang Islam itu bisa mewarnai *balдах* dengan *thoyibah*. Allah berfirman artinya “Barang siapa yang mengerjakan amal *shaleh*, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Surat an-Nahl ayat 97 yang menjadi tafsiran dari *balдах* *thoyibatun wa robbun ghofur*).

Jadi, menurut Basalamah sebelum mewujudkan *balдах* yang *thayyibah*, terlebih dahulu *hayatan thayyibah*, kehidupan yang baik, yang tercipta ketika warga negaranya mengerjakan kebaikan (amal shaleh). Senada dengan amal *shaleh*, warga negaranya pun harus beriman, sesuai dengan pendapat KH. Subhan Makmun yang menyatakan bahwa:

Mewujudkan *balдах* *thoyibatun wa robbun ghofur* apabila masyarakatnya *law amanna ahlul quro* “apabila suatu umat atau kaum itu iman dan taqwa, Allah akan menurunkan barokah langit dan bumi” itu memang konsep dalam Al-quran, tapi pelaksanaan masih repot, tapi kita tidak boleh putus asa dan tetap berusaha mencapai *balдах* *thoyibatun wa robbun ghofur*.

### **Kendala yang Dihadapi NU dalam Memperjuangkan Nasionalisme Indonesia.**

Menurut KH. Said Aqil Siraj, “Sama sekali tidak secara internal. Alhasil andaikan Indonesia terancam, NU siap turun terdepan, kiai dan santri siap membela”. Semua kiai yang diwawancara menyatakan kendala internal tidak ada, yang ada adalah kendala pada penanaman generasi muda atas pengaruh luar baik dari paham wahabi maupun paham asing lainnya.

Oleh karena itu, kendala yang dihadapi menjadi tantangan bagi NU untuk siap kapan pun menghadapinya baik kendala internal (dating dari dalam) maupun kendala eksternal (dating dari luar).

## **Pembahasan**

### **Subjek Pemikiran NU dalam Mengembangkan Nasionalisme di Indonesia**

Subjek pemikiran NU dalam mengembangkan nasionalisme di Indonesia adalah pemikiran KH. Hasyim Asyari yang menyatukan antara nasionalisme dan Islam. Untuk pembahasan ini, maka kita harus mengetahui relasi antara agama dan negara. Menurut Wahid & Ghazali (2010,460) secara kategorial, paling tidak ada tiga paradigma pemikiran politik Islam dalam melihat relasi agama dan negara yaitu *pertama*, paradigma integralistik yang mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Islam adalah *din wa dawlah*. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara.

*Kedua*, paradigma yang mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan negara. Sebab, melalui negara, agama dapat berbiak dengan baik. Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan melalui kekuasaan negara. Begitu juga sebaliknya, Negara memerlukan kehadiran agama, karena hanya dengan agama suatu negara dapat berjalan dalam sinaran etik-moral.

*Ketiga*, paradigma sekularistik yang menolak kedua paradigma sebelumnya; integralistik dan substantif. Sebagai gantinya, diajukkanlah konsep pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam, atau menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individual semata.

Tradisi amaliyah dalam Nahdlatul Ulama sejalan dengan nilai nasionalisme yaitu menjaga tradisi, menjaga jati diri bangsa Indonesia, kepribadian yang menjadi ciri khas Indonesia. Salah satu tradisi amalliah NU adalah dengan istighotsah, dzikir bersama, hal ini dapat menjadi suatu unsur pembentuk nasionalisme yaitu persamaan dan persaudaraan. Dalil dzikir berjamaah salah satunya adalah ketika Rasulullah bersabda :”Apabila kalian melewati taman surga maka nikmatilah (mampirlah), para sahabat bertanya : “Wahai Rasullullah, apa

taman surga itu?” Rasulullah SAW menjawab : “Perkumpulan dzikir” (HR. Imam Turmuzdi dan Imam Baihaqi).

Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran (Murod, 2011:54) menyatakan bahwa unsur-unsur nasionalisme dapat ditemukan dalam Al-Quran antara lain persamaan keturunan, persamaan bahasa, persamaan adat istiadat, persamaan sejarah, cinta tanah air, dan membela negara.

Penggunaan istilah nasionalisme oleh beberapa pakar digunakan bergantian dengan istilah rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Penjelasan nasionalisme sebagai rasa kebangsaan terdapat dalam beberapa literatur.

Dalam penjelasan Pasal 77J ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa:

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan tersebut menunjukkan lebih istilah penggunaan “rasa kebangsaan” daripada “nasionalisme” dalam tujuan pendidikan kewarganegaraan. Berkaitan dengan rasa kebangsaan, Nahdlatul Ulama pun lebih sering menggunakan istilah “kebangsaan”, hal ini terbukti dari hasil-hasil Muktamar dan Konferensi NU yang disatukan dalam buku *Ahkamul Fuqoha* (LTNNU, 2007). Berikut ini beberapa hasil dalam muktamar dan konferensi Nahdlatul Ulama yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Keputusan Muktamar NU Ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, 4 Desember 1994 (LTNNU, 2007:613-622): Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan, dalam Mukadimah dikatakan bahwa:

Nahdlatul Ulama telah menegaskan hubungan antar agama dan negara dan memposisikan tanggung jawab sebagai umat beragama (Islam) dengan tanggung jawab sebagai warga negara (Indonesia) secara jelas dan proporsional. Konsep

kembali ke khittah 1926, dan pandangan Nahdlatul Ulama tentang Pancasila serta paham tri ukhuwah secara terpadu : *Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah, Wathaniyah, dan Ukhuwah Basyariah* merupakan pedoman dasar yang dirasakan sangat relevan bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warga Nahdlatul Ulama.

Apabila melihat uraian dari para kiai, dari para ahli dan juga hasil-hasil keputusan Nahdlatul Ulama, maka dapat diketahui bahwa nasionalisme NU sejalan dengan Alquran. Ini kembali menguatkan eksistensi NU dalam memperjuangkan nasionalisme Indonesia dengan tetap berdasarkan Alquran, serta menguatkan eksistensi nasionalisme yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sebagai upaya mewujudkan Indonesia menjadi *baladun thayibatun wa robbun ghofur*. Subjek pemikiran Nahdlatul Ulama tentang nasionalisme Indonesia adalah pemikiran KH. Hasyim Asy’ari dan perilaku dakwah Walisongo yang tentunya selaras dengan nilai-nilai *ahsunnah wal jamaah*.

### **Pemikiran NU dalam Mewujudkan Warga Negara yang Baik dan Cerdas (*Smart and Good Citizenship*)**

Dari berbagai pendapat kiai NU, menurut mereka warga negara yang baik adalah mereka yang taat hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Upaya yang dilakukan untuk membentuk warga negara yang baik adalah melalui pesantren, karena salah satu basis Nahdlatul Ulama adalah pesantren.

Dalam upaya membentuk warga negara yang baik melalui pesantren, sebagai subjek yang dibina adalah santri yang setiap hari akan didik dan mengikuti sistem pendidikan selama 24 jam di pesantren. Sehingga santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren karena langkah pertama dalam tahap-tahap membangun pesantren adalah harus ada murid yang datang untuk belajar kepada seorang alim (Dhofier, 1985:52).

Sekarang istilah warga negara yang baik (*good citizen*) dianggap kurang sehingga perlu ditambahkan kata cerdas, sehingga menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*). Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari fungsi pendidikan nasional

Indonesia juga diharapkan mampu membentuk tidak hanya warga negara yang baik saja tetapi juga warga negara yang cerdas, lengkapnya adalah warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Winarno, 2012: 55).

Pendapat Winarno di atas sesuai dengan dimensi kurikuler pendidikan kewarganegaraan. Dalam penelitian ini, melihat pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosio kultural. Salah satu domain *Civic Education* adalah domain sosio kultural yaitu proses pendidikan kewarganegaraan yang ada di masyarakat atau bisa disebut *Community Civic Education* (Winataputra, 2012: 257). *Community civic education* dapat dikembangkan untuk berbagai komunitas masyarakat bangsa dan negara, misalnya untuk pejabat negara dan birokrat (*administration civic education*), politisi (*political education*), akademisi (*proffesional civic education*), praktisi/teknisi wartawan sdb (*practitioner civic education*), pejabat pada pemerintah daerah, kelompok masyarakat (*pupular civic education*) (Winataputra, 2012: 257-258).

Sosok warga negara yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan adalah warga negara yang merdeka yang tidak jadi beban bagi siapa pun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum (Isep, 2013:14).

Nahdlatul Ulama dalam melihat tujuan pendidikan kewarganegaraan yakni membentuk warga negara yang baik, sudah memberikan ciri atau kriteria warga negara yang baik menurut para kiai NU dalam wawancara dengan peneliti, yaitu warga negara :

1. memiliki rasa nasionalisme yang religius;
2. memiliki rasa nasionalisme yang kuat dengan menjaga keutuhan rumah tangga;
3. menaati hukum dan menjalankan ajaran agamanya;
4. warga yang memiliki patriotisme ala pesantren yang tidak takut dengan asing;
5. warga negara yang berilmu dan beriman;
6. mentaati aturan-aturan pemerintah, mengarahkan keluarga untuk bisa

seperti mentaati pemerintah, mengarahkan lingkungan atau mengajak taat kepada pemerintah;

7. warga yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan taat kepada pemerintah, dan
8. tidak melawan pemerintah selama warga negara bebas menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, dan harus berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, tidak golput.

Berdasarkan pemaparan di atas baik dari hasil penelitian maupun pendapat ahli, maka warga negara yang baik adalah warga negara yang taat terhadap hukum negara maupun hukum agama. Upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama adalah melalui pendidikan pesantren.

### **Sikap dan Langkah Perjuangan NU yang Sesuai Khittah 1926 dalam Partisipasi Mempertahankan Nasionalisme Indonesia.**

Berdasarkan pemaparan para kiai NU dalam penelitian ini, sikap dan langkah NU dalam memperjuangkan nasionalisme di Indonesia yang pernah dilakukan yaitu:

NU dalam keputusan ijtihad politiknya dalam muktamar di Banjarmasin tahun 1936 mengambil keputusan bahwa negara dan tanah air Indonesia yang masih dijajah Belanda wajib dilestarikan berdasarkan hukum fiqh' Islam. Indonesia saat mendapat kemerdekaan bukan berbentuk negara Islam (*Darul Islam*) atau negara perang (*Darul Harb*) melainkan negara damai (*Dar'as Shulh*).

Resolusi jihad yang dilontarkan oleh KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 yang isinya sebagai berikut: kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan, RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang wajib dibela dan dipertahankan, warga NU wajib mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Memberi gelar pemegang kekuasaan yang sah secara *de facto* dalam keadaan darurat kepada Presiden Soekarno dalam menumpas pemberontakan yang terjadi dimana-mana. Keputusan menerima asas tunggal Pancasila dan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah final sesuai dengan muktamar NU ke 27 di Situbondo tahun 1984.

Keputusan NU tentang wawasan kebangsaan dalam muktamar NU ke 29 di

Tasikmalaya pada tahun 1994 yang isinya antara lain: NU memandang bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan universalisme Islam bahkan nasionalisme bisa menjadi sarana untuk memakmurkan bumi Allah sebagai amanat-Nya dan sejalan dengan budaya yang dimiliki oleh bangsa, pluralitas yang menyangkut kemajemukan agama, etnis, budaya, dan sebagainya adalah merupakan *sunnatullah* dan rahmat dalam sejarah Islam, memberikan jaminan bertoleransi, kebersamaan, keadilan, dan kejujuran.

Selain pendapat para kiai di atas, keputusan organisasi NU pun mengeluarkan beberapa hal yang tercantum dalam hasil Mukmtar maupun Konferensi Alim Ulama Nahdlatul Ulama. Dalam Keputusan Mukmtar NU ke-20 di Surabaya tanggal 18-13 September 1954 (LTNNU, 2007:269) menyatakan:

Mengesahkan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954 yang menyatakan bahwa Presiden RI (Soekarno) dan alat-alat negara adalah *waliyul amri dharuri bisy syaukaha* (Penguasa Pemerintahan secara darurat sebab kekuasaannya). Keterangan diambil dari kitab *Syarah Al-Ihya* dan *Kiyatul Akhyar* yang artinya: Imam Ghazali berpendapat, keberadaan syarat-syarat (yang selayaknya ada bagi seorang pemimpin) secara lengkap adalah sulit pada masa kita sekarang ini, karena tidak adanya mujtahid mandiri. Dengan demikian, maka bolehlah melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh penguasa walaupun bodoh atau fasik agar kepentingan umat Islam tidak tersia-siakan. Menurut Imam Safi'i pendapat ini adalah yang paling benar.

Dalam Keputusan Mukmtar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, 4 Desember 1994 (LTNNU, 2007: 621) salah satunya berisi tentang pandangan Nahdlatul Ulama tentang dasar negara Pancasila yang berisikan bahwa:

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa NU telah menunjukkan sikap nasionalisme sejak zaman

penjajahan Belanda, karena hal tersebut dilandasi ajaran *ahlussunnah waj jama'ah* yang menganut prinsip *tawassut* (moderat), *tawazun* (keeseimbangan), *ta'adul* (keadilan), *tasamuh* (toleransi).

### **Pandangan NU Tentang Organisasi-Organisasi Islam Internasional yang Ingin Mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia**

Berdasarkan data penelitian, prespektif Nahdlatul Ulama terhadap organisasi-organisasi Islam internasional yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah adalah sangat membahayakan keutuhan bangsa, Islam di Indonesia adalah khas nusantara yang berbeda dengan Timur Tengah. Nasihat para kiai NU terhadap santrinya "kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang berada di Indonesia". Hal ini menjadi acuan para kiai dan santri untuk menjaga Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk ancaman yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia.

Menurut pandangan para kiai NU, gerakan yang ingin mendirikan negara Islam atau Khilafah Islamiyah di Indonesia tidak lepas dari aliran atau ajaran kelompok Wahabi.

Saat ini, umat Islam di dunia tidak memiliki khalifah, karena memang tidak mampu melakukannya seperti yang diungkapkan oleh para kiai NU diatas. Suatu kewajiban akan menjadi gugur ketika tidak mampu melakukannya. Sementara Hizbut Tahrir berpendapat lain, menurut mereka umat Islam saat ini menanggung dosa besar secara kolektif karena tidak mengangkat seorang khalifah, dan bahkan Islam pun sekarang telah tiada karena khalifah tidak ada. tentu saja ini pendapat yang sangat ekstrim (*ghuluw*), berlebih-lebihan dan tidak benar dalam perspektif kajian keagamaan yang jernih berdasarkan Alquran, Sunnah, dan pandangan para ulama yang otoritatif (*mu'tabar*) menurut umat Islam.

Mengenai konsep khilafah, ditemukan dalam keputusan Mukmtar Nahdlatul Ulama di Cipasung tahun 1994 yang berisikan tentang pandangan NU tentang wawasan kebangsaan dan kenegaraan (LTNNU, 2007: 617) yang menyatakan bahwa:

Kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab kekhilafahan yang lebih besar, yang

menyangkut kehidupan bersama seluruh manusia dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin di dunia dan akhirat. Dalam kaitan itu, kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ke-Tuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah. Dengan demikian, maka pemerintah (*umara*) dan ulama – sebagai pengemban amanat kekhilafahan – serta rakyat adalah satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut.

Pemerintah dan Ulama merupakan *ulil amri* yang harus ditaati dan diikuti oleh segenap masyarakat sesuai Alquran surat An-Nisa ayat 59 yang memberikan pedoman dasar mengenai beberapa prinsip dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yaitu:

- a. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan ketaatan mutlak.
- b. Ketaatan kepada *ulil amri* merupakan ketaatan yang bersifat tidak mutlak dan tergantung apakah perintah dan kebijakannya sejalan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.
- c. *Ulil amri* harus terdiri atas orang-orang yang mengemban amanat Allah. Rakyat memiliki hak untuk melakukan kontrol dan memberikan koreksi terhadap *ulil amri* dengan menggunakan cara-cara yang baik.
- d. Kekuatan penentu dalam setiap kemungkinan terjadinya perselisihan adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya.
- e. Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan adanya lembaga yang memiliki kebebasan dari (kemungkinan) tekanan dari rakyat dan/atau *ulil amri*, agar dapat memberikan keputusan yang adil (LTNNU, 2007:617).

Merujuk pada hasil Keputusan Mukhtamar NU KE-11 di Banjarmasin, 9 Juni 1936 (LTNNU, 2007:176) : “sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan “negara Islam” karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya”, keterangan dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin* bab “*Hudnah wal Imamah*” yang artinya:

Semua tempat dimana muslim mampu untuk menempatnya pada suatu masa tertentu, maka ia menjadi daerah Islam yang ditandai berlakunya syariat Islam pada masa itu. Sedangkan pada masa sesudahnya walaupun kekuasaan umat Islam telah terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan larangan mereka untuk memasukinya kembali atau pengusiran terhadap mereka, maka dalam kondisi semacam ini, penamaannya dengan “daerah perang” hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak hukumnya. Dengan demikian, diketahui bahwa tanah Betawi dan bahkan sebagian besar tanah Jawa adalah “Daerah Islam” karena umat Islam pernah menguasainya sebelum penguasaan oleh orang-orang kafir.

Sehingga walaupun saat ini Indonesia tidak menggunakan dasar Islam secara legal formal, sudah dapat dikatakan sebagai negara Islam walaupun menggunakan dasar Pancasila. Hal ini dikuatkan dengan pendapat KH. Sayid Abdurahman ketika wawancara penelitian bahwa:

Pancasila itu dikaji dari Al-Qur`an, Pancasila kalau dalam bahasa politik digali dari “bumi pertiwi”, mengapa? Ini untuk meredam atau supaya tidak menyinggung perasaan minoritas, yang dimaksud bumi pertiwi dalam istilah *mantiq* yakni *min itlaqil mahal, wa irodatil mahil*, menyebut tempat tapi yang dimaksud adalah orang yang menempati. Indonesia mayoritas muslim, artinya Pancasila digali dari Islam, begitu bahasa sebenarnya. Buktinya sembilan orang yang merumuskan Pancasila, banyak terdiri dari para Kiai. Itu harus di jelaskan, kenapa sekarang banyak yang menentang Pancasila, karena tidak dijelaskan dengan tujuan tidak menyinggung perasaan umat agama lain.

Dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Lombok Nusa Tenggara Barat, 20 November 1994 tentang Nasbul Imam dan Demokrasi, dinyatakan bahwa : Proses pengangkatan kepemimpinan negara sebagai pengemban dan pemikul amanat kekuasaan menurut Islam dapat dilakukan dengan beberapa alternatif/cara yang disepakati oleh rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan syariah (LTNNU, 2007: 639).

Negara harus dibangun di atas nilai-nilai luhur keislaman yang antara lain meliputi *al-‘adalah* (keadilan), *amanah* (kejujuran), dan *al-syura* (kebersamaan). Untuk merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut diperlukan adanya kesadaran dan keinginan yang kuat dari rakyat untuk bersama-sama melahirkannya.

Negara demokratis yang merupakan perwujudan *syura* dalam Islam menuntut para pemimpinnya bukan saja bersedia untuk dikontrol, tetapi menyadari sepenuhnya, bahwa kontrol sosial merupakan kebutuhan kepemimpinan yang memberi kekuatan moral untuk meringankan beban dalam mewujudkan pemerintah yang adil, bersih, dan berwibawa.

Dalam keputusan tersebut menunjukkan bahwa NU lebih mengutamakan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa daripada melegalformalkan Islam dalam bentuk negara. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Bahtsul Masail Mukhtamar XXX NU di Lirboyo Kediri, 21-27 November 1999 Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi :

Demokrasi kini merupakan salah satu sistem tatanan kenegaraan ideal yang didambakan oleh seluruh negara di dunia, terutama setelah runtuhnya Imperialisme-Kolonialisme usai perang Dunia II. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat (*as-siyadah lil ummah*). Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai *amanah* dan penegak keadilan (LTNNU, 2007: 660).

Dari keputusan Mukhtamar di atas, dapat diketahui bahwa sistem Demokrasi pun tidak bertentangan dengan Islam, hal ini berbeda dengan pendapat organisasi lain yang menyatakan bahwa demokrasi adalah *thoghut*. Demokrasi di Indonesia memang bukan demokrasi Barat yang sekuler, menurut Cecep Darmawan dalam pertemuan dengan penulis menyatakan bahwa : “demokrasi Indonesia adalah Teo Demokrasi, atau demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan”. Selanjutnya Darmawan pun mencontohkan “tidak mungkin keluar keputusan untuk melegalkan judi dan pelacuran, karena Indonesia demokrasinya adalah teo demokrasi”.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa organisasi yang ingin mendirikan negara Islam atau Khilafah di Indonesia dapat membahayakan keutuhan bangsa. Apabila mereka paham, sebenarnya Indonesia sudah menjadi hukum Islam, dan tidak perlu bentuk negara Islam secara legal formal karena tidak ada perintah dari Allah maupun Rasulullah yang mengharuskan mendirikan negara Islam.

### **Peran NU Sebagai Organisasi Perjuangan Nahdliyin Terhadap Pembinaan Moral Bangsa Indonesia**

Peran Nahdlatul Ulama terhadap pembinaan moral bangsa dilakukan melalui pendidikan pesantren yang diintegrasikan dengan pendidikan umum. Pesantren dinilai dapat menjadi solusi dari masalah moral bangsa Indonesia. Pendidikan pesantren menurut para kiai memuat pendidikan karakter dan patriotisme Indonesia. Istilah pesantren berasal dari bahasa Sansekerta yang memperoleh wujud dan pengertian tersendiri dalam bahasa Indonesia. Asal katanya adalah *sant* yang berarti orang baik dan *tra* yang berarti suka menolong, jadi apabila digabungkan menjadi *santra* berarti orang baik yang suka menolong. Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan *pe* di depan dan akhiran *an* berarti tempat tinggal para santri (Dhofier 1985:18). Maka pondok pesantren adalah asrama tempat tinggal para santri.

Pada pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama ada delapan macam bidang pengetahuan yang diajarkan kepada para santri dalam bentuk kitab-kitab Islam klasik, antara lain: 1) Nahwu dan Saraf (morfologi bahasa arab); 2) Fiqh; 3) Usul fiqh; 4) Hadis; 5) Tafsir; 6) Tauhid; 7) Tasawwuf dan etika; dan 8) Cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Semua jenis kitab ini dapat digolongkan ke dalam kelompok menurut tingkat ajarannya, misalnya : tingkat dasar, menengah dan lanjut. Kitab yang diajarkan pesantren di Jawa pada umumnya sama (Dhofier 1985: 51).

Selama pengamatan peneliti, melalui pelajaran kitab-kitab tersebut seorang santri dapat menjaid paham segala ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik dari sisi ibadah maupun muamalah. Menurut Rahmawati (2013: 307) secara tersirat inti dari tujuan pondok pesantren itu adalah untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi

semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana. Keberadaan para santri di pesantren mempunyai latar belakang dan alasan-alasan yang berbeda. Hal ini akan membentuk kualitas pada diri santri itu sendiri dalam menyerap nilai-nilai Agama Islam.

Menurut Darajat faktor-faktor penyebab dari kemerosotan moral dewasa ini sesungguhnya banyak sekali, antara lain yang terpenting adalah:

Kurang tertanamnya jiwa agama dalam masyarakat, dikarenakan keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik; pendidikan moral tidak terlaksana menurut mestinya, baik di rumah tangga; sekolah maupun masyarakat, Suasana rumah tangga yang kurang baik; diperkenalkannya secara populer obat-obat dan alat-alat anti hamil; banyaknya tulisan, gambar, siaran TV, kesenian-kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar dan tuntunan moral; kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang (*leisure time*) dengan cara yang baik, dan yang membawa kepada pembinaan moral (Komariah, 2011:48).

Dari pemaparan di atas, dapat menguatkan bahwa Nahdlatul Ulama dalam membina moral bangsa melalui pesantren sebagai pusat pendidikan karakter dan moral generasi muda sekaligus sebagai cara untuk membentuk warga negara yang baik.

### **Pandangan NU Terhadap Upaya Untuk Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai *Baldatun Thayibatun Wa Robbun Ghofur***

Menurut KH. Said Aqil Siraj dalam wawancara menyebutkan bahwa:

Untuk mewujudkan *baldatun thayibatun wa robbun ghofur* syaratnya warga negara harus beriman kepada Allah, menegakan ibadah, dan siap dalam pertahanan negara. Para kiai sebelum membangun negara adalah membangun desanya dulu "*qoryatun thayibatun wa robbun ghofur* dulu, agar terbawa dan mendapat keberkahan karena ampunan dari Allah SWT.

Upaya NU dalam mewujudkan NKRI menjadi *baldatun thayibatun wa robbun ghofur* diawali dari desa atau daerah di sekitar pesantren. Unsur dari *baldatun thayibatun wa robbun ghofur* adalah warga negara yang baik dan cerdas (beramal shaleh), pemimpin yang menjadi teladan, dan strategi yang dimiliki oleh pemimpin dalam membangun negara.

Istilah *Baldatun Thayyibah* berasal dari Al-quran, yaitu dalam Surat Saba ayat 15. Dalam ayat tersebut diartikan dengan negeri atau daerah yang baik. Kata *baldatun* berasal dari kata *balad*, secara bahasa biasa diterjemahkan dengan tempat sekumpulan manusia hidup. *Baldatun Thayyibatun* berarti mengacu pada tempat bukan pada kumpulan orang. Namun penyusun tetap memasukkan ungkapan tersebut dalam istilah masyarakat ideal dengan pertimbangan faktor kebahasaan. Dalam studi bahasa dikenal istilah "makna kolokasi". Artinya beberapa istilah atau kata yang berada dalam lingkungan yang sama. Sebagai contoh kalau dikatakan, kertas, lem, daftar gaji, komputer, meja dan kursi maka bayangannya adalah kantor atau sekolah. Demikian halnya kalau dikatakan tanahnya subur, penduduknya makmur serta pemerintahannya adil, maka bayangannya adalah masyarakat yang ideal. Menurut Ritaudin (2013:80) menyatakan bahwa:

Allah Swt. menyuruh manusia mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Saw, seperti diungkapkan oleh Siti Aisyah, bahwa sikap dan perbuatan Nabi adalah seluruh isi Al-Qur'an Dari sinilah sumber nilai/akhlak Islami, yang perlu diteladani dan dilaksanakan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari setiap muslim dan muslimah, tidak peduli apakah ia rakyat jelata, ataukah ia pejabat pemerintah, pengurus partai, alim ulama, dan lain sebagainya. Jika tuntunan ini diimplementasikan dalam kehidupan Negara, maka niscaya *baldatun thayyibatun wa robbun ghafur* akan berdiri kokoh atas ridho Allah SWT

Dalam upaya mewujudkan *baldatun thayibatun wa robbun ghofur*, Habib Lutfhi dalam wawancara penelitian menyatakan bahwa :

Indonesia, kalau ingin menjadi *baldatun thayibatun wa robbun ghofur*, berarti kita semua sebagai pemilik bangsa, harus berbuat baik terlebih dahulu, dengan negara tetangga berhubungan baik,

sesama warga berhubungan baik, saling sayang dan mengasihi, sehingga akan turun rahmat dan ampunan dari Allah untuk kita semua bangsa Indonesia.

Sehingga penekanan dalam mewujudkan *baldatun thayibatun wa robbun ghofur* adalah diawali dengan perbuatan baik di mulai dari lingkungan keluarga. Mengenai berbuat baik atau beramal sholeh, dikuatkan dengan pernyataan KH. Syaikh Sholeh Basalamah dalam wawancara penelitian bahwa:

Konsep *baldatun thayibatun wa robbun ghofur* bukan berarti sebagai negara Islam, tapi orang Islam itu bisa mewarnai *balдах* dengan *thoyibah*. Allah berfirman artinya “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Surat an-Nahl ayat 97 yang menjadi tafsiran dari *baldatun thayibatun wa robbun ghofur*).

Dalam salah satu Keputusan Muktamar di Cipasung Tasikmalaya Tahun 1994 merasa tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa di masa mendatang (LTNNU, 2007: 622) sehingga mencantumkan :

Indonesia dalam berbagai kondisinya adalah rahmat yang sangat besar dari Allah, yang wajib disyukuri seluruh-luhurnya, dengan melestarikannya, mengembangkannya, dan membangunnya sepanjang zaman. Segala kekurangannya ditingkatkan dan disempurnakan untuk mencapai *baldatun thayibatun wa robbun ghofur*, negara adil dan makmur di bawah *maghfirah* (ampunan) Allah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa Nahdlatul Ulama pun turut berperan dalam upaya mewujudkan Indonesia menjadi *baldatun thayibatun wa robbun ghofur* yang diawali dengan membangun keluarga dan lingkungan desa di sekitar pesantren dan juga selalu selaras dan sejalan dengan keputusan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## **Kendala NU dalam Memperjuangkan Nasionalisme Indonesia.**

Kendala dalam memperjuangkan nasionalisme adalah mengenai penerapan dan pembimbingan kepada generasi muda agar memiliki jiwa nasionalisme. Para kiai Nahdlatul Ulama menilai bahwa kendala dalam memperjuangkan nasionalisme berasal dari internal dan eksternal. Dari internal, tidak semuanya ingin mengikuti generasi sebelumnya, karena perkembangan informasi sangat pesat, terutama generasi muda. Makanya muncul gerakan liberal dari generasi muda NU. Sedangkan eksternal yaitu ormas yang berdiri setelah merdeka, apalagi yang berdiri setelah reformasi ini yang ingin menghacurkan nasionalisme dengan dalil agama. KH. Said Aqil Siraj dalam wawancara menyatakan bahwa:

Untuk menghadapi kendala tersebut, warga negara khususnya dari NU harus sabar dalam segala posisi, biasa, dikritik biasa, menang biasa, kalah biasa, untung biasa, rugi biasa, tetapi harus tetap semangat dalam berjuang mempertahankan NKRI. Solusi dalam menanggulangi kendala yang ada adalah meningkatkan pendidikan formal di lingkungan pesantren, NU harus mempunyai pendidikan tinggi yang bagus, karena para pemuda itu semangat nasionalisme sangat tinggi, sehingga rasa nasionalisme yang didapatkan adalah nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme dari paham negara asing.

Menurut Baso (2013:284), kendala NU saat ini adalah “menghadapi ancaman eksternal, yaitu kader-kader penjajah bangsa asing yang tidak suka ideologi-ideologi populis yang dimiliki rakyat kita. Karena NU identik dengan populis”. Dalam pandangan Setiawan (2007:vi) NU harus menghadapi gerakan gerakan formalisasi syariat Islam di Indonesia yaitu melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, juga gerakan penegakan syariat Islam di berbagai Daerah dalam pemberlakuan syariat Islam secara formal dalam bentuk Peraturan Daerah. Padahal NU memiliki pandangan bahwa syariat Islam untuk dilaksanakan oleh umat Islam dan tidak untuk dilegalformalkan dalam kehidupan kenegaraan. Apabila merujuk pada data penelitian ini, maka sebenarnya

kendala yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama dalam menamakan nilai nasionalisme adalah berasal dari eskternal yaitu kelompok wahabi dan juga kader penjajah asing.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah subjek pemikiran Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan nasionalisme di Indonesia adalah berasal dari pemikiran Hasyim Asy'ari melalui resolusi Jihad yang menyamakan pembelaan terhadap tanah air hukumnya *fardu ain* seperti kewajiban shalat. Rasulullah tidak pernah menyerukan umatnya (warga negara) untuk mendirikan negara Islam secara legal formal. Tradisi amaliah dalam Nahdlatul Ulama sejalan dengan nilai nasionalisme yaitu menjaga tradisi, menjaga jati diri Bangsa Indonesia, kepribadian yang menjadi ciri khas Indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah dan menjaga pemberian Allah.

Warga negara yang baik menurut Nahdlatul Ulama adalah warga yang nasionalis religius yaitu mentaati hukum negara dan hukum agama. Sikap dan langkah perjuangan NU dalam partisipasi mempertahankan nasionalisme Indonesia adalah fleksibel, tidak melawan pemerintah, dan mengedepankan *local wisdom* (kearifan lokal). Perspektif Nahdlatul Ulama terhadap organisasi-organisasi Islam internasional yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah adalah sangat membahayakan keutuhan bangsa, Islam di Indonesia adalah khas nusantara yang berbeda dengan Timur Tengah, jangan memaksakan Indonesia menjadi negara Islam secara formal. Kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang berada di Indonesia, sehingga wajib membela negara Indonesia, bukan mendirikan negara Islam di Indonesia.

Peran Nahdlatul Ulama terhadap pembinaan moral bangsa dilakukan melalui pendidikan pesantren yang diintegrasikan dengan pendidikan umum. Upaya NU dalam mewujudkan NKRI menjadi *baldatun thoyabatun wa robbun ghofur* diawali dari desa atau daerah di sekitar pesantren. Unsur dari *baldatun thoyabatun wa robbun ghofur* adalah warga negara yang baik dan cerdas (beramal shaleh), pemimpin yang menjadi teladan, dan strategi yang dimiliki oleh pemimpin dalam membangun negara. Pembinaan nasionalisme terhadap generasi muda yang masih belum

maksimal menjadi kendala bagi NU dalam perjuangan nasionalisme saat ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andriansyah, Yuli. (2013). Kualitas Hidup Menurut tafsir Nusantara: *Baladatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafûr* Dalam Tafsir Marâh Labîd, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Annûr, Tafsir Departemen Agama dan Tafsir Al-Mishbâh dalam *Prosiding seminar UII 2013 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari* [Online]. Tersedia: [http://dppm.uui.ac.id/dokumen/seminar/2013/ C.Yuli%20Andriansyah2.pdf](http://dppm.uui.ac.id/dokumen/seminar/2013/C.Yuli%20Andriansyah2.pdf). [22 Maret 2014]
- Baso, Ahmad. (2013). *“Agama NU untuk NKRI : Pengantar Dasar-dasar Ke-NU-an di Era Kebebasan dan Globalisasi.* Tangerang Selatan : Pustaka Afid
- Dhofier, Zamakhsyari. (1985). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai.* Jakarta: LP3ES.
- Isep. (2013). *Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum Di Kalangan Peserta Didik (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri Tanggeung Kabupaten Cianjur).* Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 14 No. 1, April 2013 Hal 13-20.
- Komariah, Kokom Siti. (2011). *Model pendidikan nilai moral bagi para remaja menurut perspektif Islam.* Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 9 No. 1 – 2011. Hal 45-54
- LTNNU Jatim. (2007). *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M).* Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Khalista
- Moleong, Lexy. (2004). *Metologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosda Karya
- Murod, Abdul Choliq. (2011). *Nasionalisme ” Dalam Pespektif Islam ”.* Dalam Jurnal Sejarah CITRA LEKHA [online], Vol. XVI, No. 2 Agustus 2011: hal 45-58. Tersedia: [ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/download/5039/4573](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/download/5039/4573) [20 Mei 2014]
- Rahmawati, Ida. (2013). *Pola Pembinaan Santri Dalam Mengendalikan Perilaku Menyimpang Di Pondok Pesantren*

- Sabilul Muttaqin, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Mojokerto. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* (Online) No 1 Vol 1 Tahun 2013. Hal 306-320 (<http://ejournal.unesa.ac.id/article/3256/41/article.pdf>) diakses 30 Juni 2014
- Ritaudin, M.Siti. (2011). Sinergisitas Agama Islam Dan Negara Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. *Jurnal TAPIs* (Online), Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013 Hal.60-82 (<http://ejournal.iainradenintan.ac.id>) diakses 30 Juni 2014
- Setiawan, Zudi. (2007). *Nasionalisme NU*. Semarang : CV. Aneka Ilmu
- Wahid & Ghazali. (2010). *Relasi Agama dan Negara : Prespektif Pemikiran Nahdhatul Ulama*. Makalah disajikan dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10 (halaman 459-284). Banjarmasin, 1-4 November 2010
- Winataputra, Udin S. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Prespektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press
- Winarno. (2012). Karakter warga negara yang baik dan cerdas. Dalam *Progresif* Vol. 7 No 1 Juni 2012. Hal 54-62